

BAB IX PENUTUP

9.1. Kesimpulan

1. Pemerintah Provinsi Kaltara secara umum telah menunjukkan keberhasilan untuk mengurangi penduduk miskin di Provinsi Kaltara dibanding capaian nasional, sedangkan yang belum berhasil (masih buruk) adalah pertama dibidang pendidikan yaitu rata-rata angka partisipasi kasar (APK) SD/MI dan jarak sekolah terdekat, kedua dibidang kesehatan yaitu rasio bidan per 100.000 penduduk, penduduk dengan pengobatan sendiri dan jarak puskesmas terdekat, ketiga dibidang pemenuhan infrastruktur dasar yaitu proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dan aksesibilitas pasar tradisional serta keempat dibidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan.
2. Akan tetapi jika dilihat per Kabupaten Kota se-Kaltara, masih ada daerah di Kabupaten/Kota yang capaian pengurangan kemiskinannya masih berada dibawah capaian Provinsi Kaltara dan capaian nasional, berarti masih buruk.
3. Belum optimalnya penggunaan *data by name by adress* oleh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kaltara untuk mengentaskan kemiskinan di Kaltara.

9.2. Rekomendasi

1. Keberhasilan terhadap pengurangan penduduk miskin di Provinsi Kaltara perlu terus ditingkatkan kualitasnya, sedangkan yang belum berhasil perlu terus diupayakan lebih konkrit lagi serta dalam mengintervensi perlu memperhatikan hasil analisis yang terdapat dalam dokumen SPKD ini.
2. SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara dalam mengeksekusi program penanggulangan kemiskinan di Kaltara hendaknya menggunakan *data by name by adress* yang telah dipublis oleh Pemerintah Pusat.
3. Perlunya Pemerintah Provinsi Kaltara menerapkan aplikasi online *data by name by adress dan by picture* yang terintegrasi dan komprehensif.
4. Dokumen SPKD Provinsi Kaltara tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam membuat program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Kaltara khususnya bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara;
5. Jika dalam perkembangan kedepan dokumen SPKD ini dianggap belum mengakomodir percepatan penanggulangan kemiskinan di Kaltara maka dapat direvisi kembali.